

PPTRA dan PR-PIDS Unsyiah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Klinik Penyusunan Peta RDTR di Provinsi Aceh



Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Klinik Penyusunan Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menjadi lokasi terakhir dari rangkaian pelaksanaan bimtek tahun 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peranan informasi geospasial dalam perencanaan tata ruang. Penyelenggaraan bimtek menjadi salah satu peran Pusat PTRA dalam upaya untuk mempercepat penyusunan Peta RDTR di kabupaten/kota melalui kegiatan peningkatan kapasitas SDM penyusun di daerah. Bimtek bertujuan memberikan pemahaman dan membangun kesadaran pegawai dinas teknis di daerah tentang standar penyusunan Peta RDTR. Peta RDTR merupakan lampiran peraturan daerah tentang RDTR yang tidak terpisahkan karena peta dapat menjelaskan secara spasial isi dari perda

tersebut kepada pengguna maupun penyusunnya.

Pelaksanaan bimtek digelar pada tanggal 12 - 15 November 2019 di Kota Banda Aceh. Pembukaan bimtek berlangsung di Aula Terpadu Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) pada tanggal 12 November 2019. Acara pembukaan dihadiri oleh Narasumber Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh, Pimpinan dan Civitas Akademika Unsyiah, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Pusat Riset Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PR-PIDS) Unsyiah serta peserta dari Bappeda atau Dinas PUPR kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan mahasiswa Program Studi Informatika Unsyiah. Kabupaten/Kota yang mengikuti bimtek ini sejumlah 19 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yaitu Bireuen, Bener Meriah, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Kota Langsa, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Pidie dan Aceh Tengah. Empat (4) kabupaten/kota yang tidak mengirinkan peserta untuk mengikuti bimtek adalah Aceh Barat, Aceh Tenggara, Simeulue dan Kota Subulussalam.

Pelaksanaan bimtek dan klinik hari kedua hingga tanggal 15 November 2019 berlangsung di The Pade hotel. Hari kedua

bimtek, tim Pusat PTRA menyampaikan materi pedoman penyusunan Peta RDTR. Pedoman disusun dalam bentuk modul penyusunan Peta RDTR yang terdiri atas delapan (8) modul masing-masing terdiri atas pengantar pemetaan RDTR, penyiapan sumberdata, pengukuran titik kontrol, orthorektifikasi dan uji akurasi, penyusunan peta dasar, pengumpulan peta tematik, penyusunan peta rencana serta modul penyusunan album peta. Klinik peta hari ketiga dan keempat dilakukan oleh tim PTRA dengan melibatkan tim PR-PIDS Unsyiah. Klinik dilaksanakan dalam bentuk desk pemeriksaan peta sebanyak 5 desk. Empat (4) desk pemeriksaan disupervisi oleh tim PTRA sedangkan satu (1) desk pemeriksaan khusus disediakan untuk tim supervisi dari PR-PIDS Unsyiah. Pemeriksaan peta dilakukan untuk semua jenis peta rencana tata ruang yang akan dikonsultasikan oleh pemerintah kabupaten/kota baik Peta RDTR maupun Peta RTRW. Jumlah peta yang diklinik terdiri atas 16 Peta RDTR dan 4 Peta Revisi RTRW.

Pelaksanaan bimtek di Provinsi Aceh sedikit berbeda dengan bimtek di beberapa provinsi sebelumnya dikarenakan adanya peran aktif dari PR-PIDS Unsyiah. [Iman Sadesmeli, 2019]

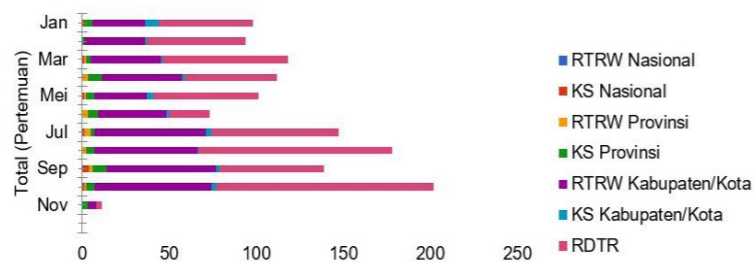


Progres Asistensi Tata Ruang

Tabel Jumlah Asistensi dan Supervisi Periode Januari - November 2019

Peta RTR	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Total
RTRW Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KS Nasional	1	0	1	0	1	0	1	0	4	1	0	9
RTRW Provinsi	0	0	1	3	1	3	4	2	2	1	0	17
KS Provinsi	5	1	3	8	5	6	2	5	8	5	3	51
RTRW Kab/Kota	30	35	40	46	30	38	63	58	63	67	5	478
KS Kab/Kota	8	1	1	2	4	2	3	1	2	3	0	27
RDTR	54	57	72	53	60	23	73	111	60	125	3	691
Jumlah	98	94	118	112	101	72	177	139	202	11		1273

Konsultasi Peta Rencana Tata Ruang 2019



104 Rekomendasi

Tabel Jumlah Rekomendasi Peta RTR Periode Januari - November 2019

Nama Provinsi	RDTR	RTRW Kab/Kota	RTRW Prov	KSP	Total
Bali	1	4	0	0	5
Aceh	1	0	0	0	1
Jambi	0	3	0	0	3
Jawa Timur	8	13	0	0	21
Jawa Tengah	2	14	0	0	16
Jawa Barat	0	6	0	0	6
Banten	0	3	0	2	5
DIY	1	2	0	0	3
Sumatera Barat	1	4	0	0	5
Kalimantan Tengah	0	6	0	0	6
Kalimantan Barat	3	0	0	0	3
Kalimantan Selatan	1	1	0	0	2
Riau	0	2	0	0	2
Kepulauan Riau	0	2	0	0	2
Sumatera Selatan	0	2	0	0	2
Sumatera Utara	0	2	0	0	2
Lampung	0	6	0	0	6
NTB	1	1	0	0	2
NTT	1	0	1	0	2
Maluku Utara	2	0	0	0	2
Gorontalo	0	1	0	0	1
Sulawesi Barat	1	0	0	0	1
Sulawesi Tenggara	0	2	0	0	2
Sulawesi Utara	0	2	0	0	2
Papua	1	1	0	0	2
Jumlah	24	77	1	2	104

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS



Bulan November adalah bulan konsolidasi bagi semua kegiatan, karena pada bulan ini mulai terindikasi beberapa kegiatan yang mengalami kendala untuk penyelesaian. Masalah umum pada kegiatan jasa konsultasi adalah adanya kewajiban menyediakan Bank Garansi (BG) bagi pekerjaan jasa konsultasi yang selesainya pada akhir Desember. Masih teringat kegiatan tahun 2018, terdapat satu perusahaan lambat untuk menyerahkan BG, sehingga lewat tahun dan hampir tidak terbayar. Meski pada akhirnya bisa terbayar pada tahun 2019, namun sangat mengganggu jalannya kegiatan pada tahun 2019 tersebut. Berangkat dari kasus 2018 tersebut, maka tahun 2019 ini sejak jauh hari sudah kami sampaikan terkait BG, bukan hanya lewat surat pemberitahuan tetapi juga pertemuan langsung dengan penyedia jasa dengan harapan masalah BG bisa berjalan lancar.

Selain masalah BG, bulan November ini kami juga disibukkan dengan berbagai revisi anggaran baik Revisi POK maupun revisi DIPA dan finalisasi kegiatan tahun 2020. Beberapa kegiatan tidak kami lanjutkan di tahun 2020 karena murni kebijakan pimpinan, diantaranya yaitu penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan dan penyusunan neraca sumberdaya alam Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Aspek geospasial (peta) wilayah perbatasan sebenarnya dikerjakan oleh PPTRA karena permintaan Bappenas beberapa tahun sebelumnya. Sebagai catatan bahwa masalah pada kawasan perbatasan penyusunan tata ruangnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Saat itu kegiatan tersebut dilakukan oleh BNPP (Badan Nasionaional Pengelola Perbatasan), namun selama dua tahun dikerjakan sebatas materi teknisnya

saja yang diselesaikan sementara petanya belum optimal, padahal peta salah satu dokumen tata ruang yang wajib diselesaikan. Atas dasar itu maka sejak tahun 2017, kami diminta mengerjakan RDTR wilayah perbatasan khususnya masalah penyediaan peta dasar dan tematik. Bila kemudian kami banyak ditanya kenapa mengerjakan peta tata ruang perbatasan termasuk oleh Bappenas sendiri, kami agak kesulitan menjawabnya. Bulan November juga ditandai dengan kegiatan bersama dua pusat, yaitu berupa kegiatan peningkatan SDM seluruh staf di kedepntan Informasi Geospasial Tematik. Alhamdulillah semua kegiatan selama November berjalan lancar. Mudah-mudahan tahun 2019 ini kami bisa mengakhiri semua kegiatan dengan baik dan mencapai semua output yang ditargetkan. Aamiin [Mulyanto Darmawan, 2019]



Geoliterasi untuk Negeri

rasa cinta dan peduli terhadap wilayah NKRI. Program tersebut dituangkan melalui suatu kegiatan bertajuk "Geoliterasi untuk Negeri". Gerakan Geoliterasi atau Gerakan melele geospasial ini juga selaras dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan ke 4 yaitu Pendidikan yang berkualitas.

Pemerintah menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Gerakan Geoliterasi ini menjadi kegiatan yang rutin dan terus menerus dilakukan di Pusat PTRA terutama Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial. Sasaran gerakan ini lebih ditujukan kepada kalangan Pendidikan (Guru-guru Geografi dan murid-murid mulai SMP, SMA, hingga mahasiswa) serta masyarakat penyanggah tuna netra (SLB A) yang kurang mendapatkan asupan informasi geospasial.

organisasi, kami berharap semoga saja "Geoliterasi untuk Negeri" atau kegiatan sejenis masih tetap dapat dipertahankan demi menggaungkan informasi geospasial ke seluruh penjuru wilayah Indonesia. BIG telah menghasilkan peta dasar dan mengintegrasikan berbagai tema yang sangat penting untuk digunakan dalam pembangunan nasional (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), namun kurang lengkap jika tidak diimbangi dengan pembinaan/sosialisasi/pemaknaan informasi geospasial yang telah dihasilkan kepada seluruh masyarakat terutama kepada kalangan pendidikan dan masyarakat. Guru Geografi merupakan penyambung informasi yang mempunyai multiplier effect kepada peserta didik/mahasiswa, dan diharapkan dapat membuka cakrawala dan pemahaman terhadap NKRI secara benar sehingga tercipta harmoni kehidupan di bumi pertiwi yang kita cintai ini. [Niendyawati, 2019]



Informasi geospasial (IG) sebagai bagian dari sains ilmu pengetahuan dan teknologi informasi menjadi bagian penting dari Gerakan Literasi Nasional (GLN), yang telah dicanangkan dan digemakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. BIG mengemban misi penting agar semua masyarakat 'melek' spasial, memahami ruang wilayahnya, dan pada akhirnya menumbuhkan

Jika kedepan terjadi perubahan struktur

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Editor: Mulyanto Darmawan, Fakhruddin Mustofa, Sri Eka Wati, Randhi Atiqi, Chintia Dewi | Desain Tata Letak: Gin Gin Gustiar |

Kedepujian Bidang IGT Semakin Solid

Seluruh personil di Kedepujian Bidang IGT mengikuti kegiatan outbond dalam rangka internalisasi Reformasi Birokrasi (RB). Kegiatan tersebut dilakukan di daerah Katulampa, Bogor, 19-20 November 2019. Tujuan utama outbond gabungan dua unit eselon 2 ini adalah membangun rasa percaya (trust) dan kerjasama (corporate) seluruh staf agar Kedepujian Bidang IGT semakin solid dalam mengatasi banyak tantangan tugas yang semakin kompleks. Dalam kegiatan ini para peserta juga diminta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan rencana aksi perubahan untuk mencapai tujuan RB di Kedepujian Bidang IGT. Pelaksanaan kegiatan dipandu oleh tim dari PT. Trustco Cipta Madani yang beranggotakan sekitar 20 orang.

Konten acara secara umum terdiri dari dua hal, yaitu trust building & communication dan corporate building. Trust building &

communication dilakukan melalui kegiatan permainan kompetisi yang terdiri dari Maze, Rollet, dan Service Challenge. Dalam sesi ini, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan antar kelompok saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Semua materi permainan menekankan pada bagaimana membangun strategi, tanggung jawab, dan fokus terhadap tugas masing-masing, serta peduli terhadap setiap anggota kelompok untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Sesi corporate building juga menggunakan metode permainan. Akan tetapi, tantangan yang diberikan kepada setiap kelompok diatur sedemikian rupa sehingga mustahil diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Tantangan tersebut baru bisa ditaklukkan jika semua kelompok bersatu dan bekerjasama. Sesi ini dimaksudkan untuk menanamkan sikap kompak satu tim di Kedepujian Bidang IGT

Potret

Kegiatan

untuk mencapai visi besar organisasi.

Pada hari kedua, kegiatan outbond diisi dengan diskusi masing-masing Bidang untuk mengidentifikasi hambatan dalam tugas sehari-hari kemudian merumuskan rencana aksi perubahan. Daftar hambatan dan rumusan rencana aksi perubahan dipresentasikan oleh salah seorang staf setiap Bidang di depan seluruh peserta dan pejabat struktural eselon 1, 2, dan 3 di Kedepujian Bidang IGT. Masing-masing Bidang diberikan waktu presentasi lebih kurang 10 menit. Kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab atau tanggapan selama lebih kurang 5 menit dari pejabat eselon 2 yang membawahi Bidang tersebut. Setelah sesi presentasi dan diskusi selesai, acara kemudian ditutup oleh Deputi Bidang IGT. [Randhi Atiqi, 2019]

Neraca SDA Lahan dan Hutan Kabupaten Tojo Una-Una



Selasa, 26 November 2019 Tim Pemetaan Dinamika Sumber Daya, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial berada di Kantor Bappeda Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah untuk melakukan presentasi dan penyampaian hasil akhir dari penyusunan Peta Neraca Sumber Daya Alam khusus Lahan dan Hutan Kabupaten Tojo Una-Una. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una, Admin As Lasimpala dan dihadiri Kepala Bappeda Kabupaten Tojo Una-Una beserta Pemerintah Daerah mulai dari Kepala Dinas hingga Camat dan Lurah yang ada di kabupaten ini.

Dalam kegiatan ini, Diah Retno Minarni selaku Kepala Bidang Pemetaan Dinamika Sumber Daya memberikan pemaparan mengenai progres dan hasil pemetaan neraca sumber daya lahan dan hutan yang sudah dilakukan oleh tim dari Badan Informasi Geospasial. Perhitungan neraca sumber daya ini dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2014 s.d 2018. Berdasarkan perhitungan neraca sumber daya alam yang telah dilakukan, konversi lahan yang paling besar terjadi pada

penutup lahan Hutan Sekunder Lahan Rendah Kerapatan Sedang menjadi Lahan Terbuka Lain yang dominan berada di Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini dibenarkan oleh Bappeda Kabupaten Tojo Una-Una yang mengatakan bahwa di Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete banyak terjadi pembukaan lahan untuk perkebunan. Sedangkan untuk kawasan hutan tidak banyak terjadi perubahan dalam kurun waktu 2014 s.d 2018. Namun jika dilihat dari kesesuaian tata ruang dengan penutup lahannya, terdapat 27% luasan dari RTRW Kabupaten yang belum sesuai dan 0,12% tidak sesuai dengan penutup lahannya.

Hasil dari perhitungan neraca sumberdaya lahan dan hutan ini menjadi masukan penting bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Wakil Bupati, Admin As Lasimpala mengatakan bahwa "daerah membutuhkan perhitungan neraca sumber daya yang ada di daerahnya untuk mengetahui berapa besaran sumber daya yang sudah dimanfaatkan dan berapa cadangan sumber daya yang masih tersisa". Lebih lanjut, kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una yang menyatakan siap membantu dengan memberikan data-data yang dibutuhkan terkait penyusunan neraca sumber daya selanjutnya. [Gin Gin Gustiar, 2019]

Pemaparan Draft Hasil Pekerjaan Pemetaan Integrasi Neraca Spasial WS Bengawan Solo



Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas melalui Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya telah menyelenggarakan FGD pemaparan draft hasil pekerjaan Pemetaan Integrasi Neraca Spasial Wilayah Sungai Bengawan Solo. Pelaksanaan kegiatan FGD bertempat di Hotel Aston Madiun pada tanggal 22 November 2019. FGD pemaparan hasil ini dihadiri oleh akademisi, kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah yang masuk dalam Wilayah Sungai Bengawan Solo. FGD ini sebagai bagian dari validasi akhir pekerjaan dimaksud.

Beberapa output pekerjaan Pemetaan Integrasi Neraca Spasial Wilayah Sungai Bengawan Solo antara lain Neraca Sumberdaya Lahan 4 komponen (lahan, hutan, air dan minerba), kajian proyeksi perubahan penggunaan lahan dan kebutuhan air, kajian evaluasi kesesuaian RTRW dan kajian mengenai daya dukung dan daya tampung kawasan. Output pekerjaan tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah karena banyak dokumen-dokumen perencanaan yang mewajibkan harus memasukkan unsur kajian lingkungan.

Banyaknya pemerintah daerah yang tertarik terhadap output pekerjaan menjadikan suasana FGD pemaparan draft hasil Pemetaan Integrasi Neraca Spasial WS Bengawan Solo "sangat hidup". Sebagian besar pemerintah daerah yang hadir memberikan masukan terkait evaluasi dan kesesuaian peta RTRW serta output Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT). Hal ini karena kedua output tersebut dibutuhkan daerah untuk melakukan peninjauan kembali peta rencana tata ruang dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo memberikan apresiasi dan banyak masukan terkait metode dan output pekerjaan. Hal ini mengingat BBWS Bengawan Solo merupakan balai yang menangani banyak aspek sumberdaya air di WS Bengawan Solo dari infrastruktur hingga pengelolannya. Dalam FGD tersebut pihak BBSW Bengawan Solo juga menawarkan bantuan terkait data-data yang dibutuhkan dalam pekerjaan.

Di sesi akhir FGD, PT Geojaya Teknik sebagai pelaksana pekerjaan menyampaikan akan berusaha mengakomodasi masukan-masukan yang telah disampaikan agar output pekerjaan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. FGD selanjutnya diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta. [Sri Eka Wati, 2019]

Pleno Massal dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Peta RTRW dan RDTR



Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) kembali memberikan puluhan surat rekomendasi kepada perwakilan pemerintah daerah melalui kegiatan pleno massal yang diadakan pada tanggal 28-29 November 2019 di Darmawan Park, Babakan Madang, Bogor. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan bantuan teknis untuk pemetaan RTRW dan RDTR pada tahun 2019. Dalam pleno ini diberikan sebanyak 22 surat rekomendasi untuk peta RTRW dan 14 surat rekomendasi untuk RDTR. Kegiatan ini merupakan bagian dari target percepatan tata ruang. Sebagai catatan, masih terdapat beberapa daerah yang belum mendapatkan surat rekomendasi dari total 150 BWP RDTR dan 100 wilayah kabupaten/kota untuk RTRW.

Turut hadir Mulyanto Darmawan selaku Kepala PPTRA, yang berkenan membuka dan menyerahkan surat rekomendasi pada akhir acara. Mulyanto menyampaikan bahwa penyelesaian pemetaan dengan target yang begitu banyak pada tahun ini bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan koordinasi yang baik, kekompakan tim dalam menyelesaikan peta serta strategi pencapaian supaya pekerjaan bisa selesai pada waktunya.

Proses pleno dilaksanakan oleh Tim Teknis PPTRA dan dilaksanakan uji petik oleh Tim Peneliti BIG. Tahapan pemeriksaan yang dilakukan pada proses pleno ini adalah sumber data, peta dasar, peta tematik, peta rencana, uji petik rancangan peraturan daerah hingga album peta. Kegiatan selama dua hari ini berjalan cukup lancar dan berlangsung kondusif. Pemerintah daerah terlihat begitu antusias dalam mengikuti acara hingga akhir. PPTRA BIG berharap melalui penerbitan surat rekomendasi ini bisa memperlancar proses perizinan pembangunan di daerah, tidak hanya untuk investasi namun juga untuk kenyamanan dan kelestarian kehidupan masyarakat selama dua puluh tahun ke depan. [Chintia Dewi, 2019]

Survei Tahap 3 Dalam Rangka Penyusunan Atlas SDGs



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sudah digaungkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk sukseskan 17 poin TPB. Semua pihak pelaksana TPB mempunyai target keberhasilan hingga tahun 2030. Untuk itu semua sektor bahu-membahu sesuai kapasitas dan tugasnya mengemban amanah ini. Sebagai contoh amanah untuk mengentaskan kemiskinan, mendorong pendidikan berkualitas, mengurangi kesenjangan, terbebas dari kelaparan, pemantapan infrastruktur, dan tujuan mulia lainnya. BIG melalui bidang Atlas dan Pemetaan Sosial (APS) mendukung program SDGs ini melalui penyusunan Atlas SDGs yang menyorot dan memetakan indikator-indikator sesuai tujuannya. Melalui atlas ini, BIG menyokong pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam melihat perkembangan indikator SDGs

Sebagai bagian dari penyusunan Atlas SDGs, telah terlaksana survei lapangan tahap 3 pada tanggal 12-16 November 2019 di Provinsi Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Survei tahap 1 dan 2 telah dilaksanakan sebelumnya di Bengkulu, Nusa Tenggara Timur,

Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Dalam survei tahap 3 ini, Tim APS melakukan survei ke instansi penanggung jawab SDGs dan dilanjutkan dengan survei lapangan. Pelaksanaan survei ke instansi di Provinsi Gorontalo dan NTB dilakukan dengan model wawancara kepada Bappeda terutama Bidang Sosial Budaya untuk mengetahui secara terukur sejauh mana kemajuan penanganan SDGs. Untuk survei lapangan, Tim APS melakukan pengamatan fisik dan sosial budaya pada lokasi atau wilayah tertentu sesuai dengan hasil wawancara. Sebagai contoh melakukan pengamatan kondisi perkembangan stunting di Desa Mesanggok, Kabupaten Lombok Barat, NTB, dan pengamatan air bersih/sanitasi layak di Suku Bajo di Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Beberapa pengamatan lain juga dilakukan, misalnya pengamatan Danau Limboto yang terus mengalami pendangkalan. Danau ini menjadi salah satu dari 15 danau prioritas nasional.

Hasil dari survei menjadi input data primer draft final Atlas SDGs. Dalam kurun waktu satu bulan ke depan, kegiatan penyusunan Atlas SDGs akan dilanjutkan pada tahap finalisasi draft atlas dan percobaan e-book atlas pada platform atlas.big.go.id agar dapat dimanfaatkan pengambil kebijakan dan publik untuk mengetahui kemajuan SDGs. [Fakhrudin Mustofa, 2019]

REFORMASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

RESENSI
Buku

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) sudah menjadi kata kunci dalam pembangunan dan aktivitas hidup masyarakat di dunia. Istilah ini menggantikan dan meneruskan program MDGs yang menjadi tren dari tahun 2000 – 2015. Era SDGs memiliki tujuan yang lebih komprehensif dan beragam. Tim SDGs Unpad mencoba menghadirkan buku ini untuk dapat membantu memberikan gambaran tentang bagaimana SDGs dianalisis dan dievaluasi pencapaiannya sehingga dapat berguna untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya kabupaten/kota di Jawa Barat.

Pada bagian awal, buku ini menyajikan pembahasan mengenai pemahaman terhadap SDGs itu sendiri terkait visi baru untuk pembangunan berkelanjutan. Bagian awal juga menengahkan gambaran mengenai progres pengembangan TPB di Indonesia dan daerah. Pada bagian lebih lanjut, dibahas mengenai data dan metodologi (pemilihan dan metadata indikator SDGs), proyeksi pencapaian indikator SDGs, serta analisis kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi SDGs. Pada bagian akhir disampaikan pula bahasan mengenai pemetaan kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, realisasi komitmen SDGs, serta upaya terobosannya. Lampiran berupa peta-peta indikator SDGs kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi salah satu bagian yang menarik karena dapat diperbandingkan kemajuan SDGs antar wilayah.

Beberapa hal tentang contoh-contoh capaian SDGs yang telah disampaikan dalam buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi kabupaten/kota lain untuk menilai kemajuan SDGs di wilayahnya. Lebih jauh, metode dalam buku ini juga dapat menjadi salah satu acuan pengambil kebijakan untuk mengukur keberhasilan SDGs di tahun 2030, tahun berakhirnya program SDGs. [Adinda Cempaka, 2019]



Judul Buku : SERI MENYONGSONG SDGs, KESIAPAN KABUPATEN/KOTA, DI PROVINSI JAWA BARAT
Penulis : Armida Salsiah Alisjahbana, Arief Anshory Yusuf, Zuzi Anna, Megananda, Ahmad Komarulzaman, Agung Setiawan, Aisyah Amatul Ghina
Penerbit : Unpad Press